

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Indonesia dalam merespons pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara selama periode 2019–2024. Dengan menggunakan *Security Complex Theory* Barry Buzan dan tiga model pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Graham T. Allison, yaitu *Rational Actor Model*, *Organizational Process Model*, dan *Bureaucratic Politics Model*, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia tidak serta merta hanya hasil dari kalkulasi rasional, namun juga keluaran kelembagaan yang prosedural, serta hasil kompromi antarlembaga negara untuk menghadapi ancaman multidimensi.

Dari sisi substansi, potensi ancaman yang dihadapi Indonesia pada lima sektor adalah:

- a. Ancaman militer dengan kehadiran kapal China Coast Guard dan milisi maritim mengancam kedaulatan fisik.
- b. Ancaman politik dalam hal legitimasi klaim ZEE Indonesia dan posisi diplomatik diuji oleh narasi “nine-dash line”.
- c. Ancaman ekonomi dengan aktivitas eksplorasi migas dan perikanan terganggu akibat ketegangan kawasan.
- d. Ancaman identitas yang memunculkan tekanan bagi pemerintah untuk mempertahankan “harga diri” kedaulatan negara di mata masyarakat.

- e. Ancaman lingkungan yang timbul dari aktivitas kapal asing yang memperparah kerusakan ekosistem laut Natuna.

Dari sisi proses kebijakan, pendekatan Model I memperlihatkan bahwa Indonesia memilih langkah rasional dengan menegaskan kedaulatan melalui *note verbale*, pengerahan militer terbatas, dan menjaga stabilitas dengan tetap melanjutkan aktivitas ekonomi. Namun, Model II menunjukkan bahwa sebagian besar respons berjalan cukup lambat atau terpisah-pisah akibat birokrasi dan ketergantungan pada SOP lembaga. Sementara itu, Model III mengungkap tarik-ulur antar lembaga (Kemlu, Kemenhan, Bakamla, DPR), di mana hasil akhir kebijakan lebih bersifat kompromistis.

Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu Laut Natuna Utara bersifat adaptif, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik lintas sektor dan lembaga. Negara hadir dan tegas pada level deklaratif dan simbolik, namun masih menghadapi tantangan koordinasi dan kapabilitas dalam merespons secara strategis, responsif, dan berkelanjutan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah Indonesia:

a. Penguatan melalui Diplomasi Hukum dan Narasi Publik

Penguatan kapasitas diplomasi hukum internasional dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Biro Hukum Sekretariat Negara. Di samping itu, diperlukan

pengembangan narasi publik nasional yang konsisten di antara elite politik, pejabat teknis, dan aktor lokal, guna menghindari ambiguitas pesan terkait posisi Indonesia dalam isu kedaulatan.

b. Reformasi Koordinasi Maritim Antar Lembaga

Pemerintah perlu menetapkan struktur komando bersama antara TNI Angkatan Laut dan Bakamla dalam penanganan insiden maritim, untuk mencegah duplikasi fungsi dan konflik kewenangan. Selain itu, pembentukan mekanisme tanggap krisis lintas lembaga dengan kewenangan eksekusi cepat menjadi penting dalam situasi pelanggaran wilayah yang bersifat mendesak.

c. Integrasi Kebijakan Ekonomi dan Keamanan

Diperlukan pengembangan mekanisme perlindungan terhadap aktivitas eksplorasi minyak dan gas bumi serta perikanan di wilayah Natuna. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi antara SKK Migas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta aparat keamanan.

d. Strategi Identitas dan Mobilisasi Komunitas Lokal

Pemerintah perlu meningkatkan kehadiran negara di wilayah Natuna melalui program-program seperti transmigrasi nelayan, pemberdayaan komunitas pesisir, dan penyediaan layanan dasar, sebagai bagian dari strategi nasional membangun ketahanan berbasis masyarakat.

e. Perlindungan Lingkungan sebagai Dimensi Keamanan

Aspek perlindungan ekosistem laut harus diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan keamanan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pengawasan lingkungan perlu diperkuat melalui teknologi satelit dan

kolaborasi dengan lembaga penelitian kelautan.